BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Istilah Hubungan Internasional secara umum dapat didefinisikan bahwa hubungan internasional itu mengacu terhadap hubungan yang terjadi antar pemerintah di dunia yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berkaitan erat dengan aktor-aktor lain seperti Organisasi Internasional, korporasi internasional dan individu-individu dengan struktur sosial yang lain mencakup ekonomi, kebudayaan dan politik domestik serta pengaruh-pengaruh geografis maupun historisnya (Goldstein, 1999:3).

Hubungan internasional dilakukan oleh aktor-aktor internasional, seperti individu, *nation-state*, maupun organisasi internasional yang sifatnya lintas batas. Menurut Rosenau, terdapat lima aktor hubungan internasional, yaitu:

1. Individu-individu tertentu
2. Kelompok-kelompok dan organisasi swasta
3. Seluruh negara bangsa beserta pemerintahannya
4. Organisasi internasional
5 Seluruh wilayah geografis dan pengelompokkan-pengelompokkan politik utama dunia, seperti dunia ketiga (Rosenau, 1976: 5).

Kajian hubungan internasional sangat luas meliputi seluruh jenis hubungan atau interaksi antar negara termasuk asosiasi dan organisasi non negara serta jalinan hubungan yang bersifat politik maupun non politik (Johari, 1985: 9).

Luasnya cakupan studi hubungan internasional menyebabkan hubungan internasional sebagai studi yang berdiri sendiri membutuhkan pendekatan yang bersifat interdisipliner. Menurut Columbis dan Wolfe, studi hubungan internasional mencakup kajian ilmu politik, ekonomi, hukum, sosiologi, antropologi, serta ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, *cybernetic* (Columbis dan Wolfe, 1999: 21).

Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (seperti hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan terorisme). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila fenomena-fenomena hubungan internasional kini telah memasuki dimensi baru yang perlu ditangani dengan perangkat teoritis dan metodologi yang memadai dan akurat sehingga mengakibatkan munculnya beragam definisi mengenai hubungan internasional dari para ahli hubungan internasional.

Pada awal perkembangannya, Shcwarzenberger mengatakan bahwa ilmu hubungan internasional adalah:

> "Bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Jadi, ilmu hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga) atau pertukaran budaya (*cultural exchange*)" (Shcwarzenberger, 1964: 8).

Sementara itu, terdapat sarjana hubungan internasional yaitu menurut Hoffman yang justru memperkecil ruang lingkup ilmu hubungan internasional, yaitu:

> "Ilmu hubungan internasional merupakan subjek akademis dalam memperhatikan hubungan politik antar negara, dimana selain negara ada juga pelaku internasional, transnasional atau supranasional lainnya seperti organisasi nasional" (Hoffman, 1960: 6).

Sedangkan menurut Holsti "Hubungan Internasional" ialah:

> "Hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Studi hubungan internasional dapat mencakup analisa kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, transportasi, komunikasi, turisme dan perkembangan etika internasional (Holsti, 1988 : 29).

2.2 Politik Luar Negeri

> Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi dalam hubungan internasional. Politik luar negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai actor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadi unit politik utama dalam hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non negara semakin mengemuka perannya dalam hubungan internasional. Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan internal merupakan input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konfersi menjadi output. Proses konfersi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya (Rosenau, 1976: 171-173).

Politik luar negeri itu sendiri mengacu pada perumusan (formulasi), implementasi, dan evaluasi terhadap lingkungan eksternal, dilihat dari sudut pandang negara tersebut, atau dengan kata lain politik luar negeri adalah sub-sistem dari politik nasional melalui mana negara berupaya mengatasi perubahan-

perubahan dilingkungan eksternal maupun domestik. Untuk mempelajari politik luar negeri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelumnya, salah satu diantaranya adalah mengenai tujuan sebenarnya yang dimiliki negara didalam hubungan dengan negara lain. Hal ini perlu diperhatikan, karena politik luar negeri merupakan instrument yang dimiliki suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Tujuan *(objectives)* adalah hasil yang ingin dicapai melalui politik luar negeri. Tujuan politik luar negeri merupakan formulasi yang kongkrit yang berasal dari kepentingan nasional sehubungan dengan situasi internasional dan power yang dimiliki suatu negara. Tujuan-tujuan ini dirumuskan oleh para pembuat kebijakan.

2.2.1 Kebijakan luar negeri

Kebijakan luar negeri menurut Rosenau diartikan sebagai upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitas untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternal (Rosenau, 1976: 27). Kebijakan luar negeri ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.

> Kebijakan luar negeri memiliki tiga konsep untuk menjelaskan hubungan antara suatu negara dengan kejadian dan situasi diluar negaranya, yaitu:
> 1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi *(As a cluster of orientation)* politik luar negeri senabai sekumpulan orientasi merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk mengahadapi situasi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut, orientasi ini terdiri dari persepsi, sikap, dan nilai-nilai.
> 2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak *(As a set of commitments to and plan for action)*, kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen kongkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan

situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri.

3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi *(As a form of behavior*), pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada pada tingkat yang lebih empiris yakni berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternal.(Rosenau, 1976:16-17).

2.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan atas unsur paksaan dan telah terlegitimasi (Dougherty&pfalzgraff, 1986:418).

Menurut kusumohamidjoyo mengenai pengertian kerjasama adalah :

> Sikap kooperatif dapat bangkit bila ada perkiraan bahwa kerjasama akan membawa pada dampak yang menguntungkan bila dibandingkan dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi pada umumnya juga disadari bahwa kerjasama senantiasa membawa konsekuensi tertentu namun demikian suatu kerjasama senantiasa diusahakan justru karena manfaat yang diperoleh secara proporsional adalah masih lebih besar daripada konsekuensi yang harus ditanggung. Perbandingan yang Nampak antara manfaat dan konsekuensi dari suatu kerjasama internasional, salah satu faktor utama yang menentukannya adalah sifat dari tujuan kerjasama yang hendak dicapai dalam persoalan yang tidak mengandung banyak resiko. Orang misalnya lebih berani memulai suatu kerjasama di bidang kebudayaan dari pada di bidang militer. (kusumohamidjoyo, 1987:92).

Konsep mengenai kerjasama disampaikan oleh Cooley, dimana kerjasama tersebut terjadi dan timbul apabila:

> “Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna” (Cooley, 1930:176).

Namun demikian kesejahteraan kolektif tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan kerjasama kolektif antara individu dan negara saja namun diperlukan kerjasama yang lebih luas seperti kerjasama internasional.

Kerjasama internasional menurut Coplin dan Marbun:

> "Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun secara multilateral (Coplin & Marbun, 2003:282).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri.

Isu utama dari kerjasama internasional menurut Dougherty dan Graff, yaitu:

> "Berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentinagn tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan. Berbagai masalah tersebut telah membawa negara-negara di dunia untuk membentuk suatu kerjasama internasional" (Douherty & Graff, 1997:419).

Menurut hakekatnya dapat dikemukakan empat kerjasama internasional, antara lain :

1. **Kerjasama Universal (Global)**

   Hakekat kerjasama untuk memadukan semua bangsa didunia ke dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari disintegrasi internasional.

2. **Kerjasama Regional**

   Kerjasama antar negara yang berdekatan secara geografis, tetapi tidak hanya faktor itu saja yang memadai untuk memajukan kerjasama regional, kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, serta perbedaan struktur produktivitas yang saling membutuhkan juga menentukan terwujudnya suatu kerjasama regional (Plano&Olton, 1982:281).

3. **Kerjasama Fungsional**

   Kerjasama ini merupakan jenis kerjasama yang baru muncul pada abad ke-20. Dalam kerjasama fungsional, negara-negara yang terlibat diasumsikan saling mendukung fungsi dan tujuan bersama sehingga kerjasama itu akan melengkapi kelurangan-kekurangan pada masing-masing negara. Suatu kerjasama yang fungsional, bertolak dari cara berfikir yang pragmatis yang mensyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama atau dapat dikatakan bahwa para *partner* kerjasama itu mampu mendukung suatu fungsi spesifik yang diharapkan.

4. **Kerjasama Ideologis**

   Dalam kerangka hubungan internasional, kelompok kepentingan yang paling relevan adalah negara. Namun bagi kerjasama ideologis batas territorial adalah tidak relevan. Kerjasama ideologis sering memperlakukan negara sebagai penghambat utama. Kerjasama ini merupakan kerjasama yang dilatarbelakangi kesamaan ideologis diantara para pelku kerjasama tersebut. (Kusumohamidjoyo, 1987:92-102)

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya :

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya atau ongkos.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.

Adapun faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kerjasama internasional adalah :

1. Faktor-faktor yang mendukung kerjasama internasional :
    1. Kemajuan teknologi, kemajuan dalam bidang ini berangsur-angsur dapat menghilangkan rintangan dan perbedaanantar bangsa.
    2. Keinginan berorganisasi, organisasi internasional dikatakan sebagai fenomena dari "*multistate system*" yang berlaku dalam masyarakat internasional dewasa ini. Tugas negara sendiri dalam masyarakat internasional dan kepentingan nasional lebih mudah dicapai dengan jalan berorganisasi.
2. Faktor penghambat kerjasama internasional :
    1. Kedaulatan, kerena tidak adanya sesuatu yang pasti tentang kedaulatan. Hal ini menimbulkan persoalan dalam dalam kerjasama internasional yaitu sampai seberapa jauh negara-negara ini bersedia membatasi diri dan menyerahkan sebagian kebebasan sehingga kesulitan itu mengakibatkan rintangan kerjasama internasional.

2. Kepentingan nasional, hakekat dasar dari kepentingan nasional dari suatu negara. Atas dasar kepentingan akan berhadapan dengan kepentingan di negara lain adalah masyarakat internasional. Persaingan kepentingan nasional yang mutlak dalam hubungan antar negara yang menyebabkan adanya kesulitan terwujudnya kerjasama internasional.
3. Nasionalisme, merupakan sesuatu yang dapat memberikan kekuatan untuk mempertahankan kehidupan suatu negara. Namun apabila ajaran ini diterima secara berlebihan, maka akan berakibat buruk terhadap bangsa itu sendiri. Salah satunya adalah negara tersebut akan menutup diri untuk melakukan kerjasama dengan negara lain (kartasasmita, 1988: 21-30).

Kerjasama dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian negative yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lainnya. (Holsti, 1995:360-363).

Untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, setiap negara di dunia mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Pada dasarnya, semua negara menginginkan keuntungan timbal balik yang optimal demi kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, negara-negara di dunia saling tukar menukar barang dan jasa, mengerahkan sumber daya, melakukan perluasan penggunaan teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran bangsa.

2.3.1 Kerjasama Bilateral

> Sebagian besar transaksi dan interaksi antar Negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, atau global yang bermunculan memerlukan perhatian lebih dari satu Negara. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternative pemecahan, perundingan, atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan semua pihak. Proses seperti ini disebut kerjasama atau kooperasi. (Holsti, 1992:650).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi diantara dua pemerintah yang memilki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional. Beberapa organisasi seperti PBB menetapkan bahwa kerjasama yang berlangsung diantara negara anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi.

Pola kerjasama bilateral merupakan bagian dari pola hubungan aksi reaksi yang meliput proses :

1. Rangsangan atau kebijakan actual dari negara yang memprakarsai.

2. Persepsi dari rangsangantersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa. (Perwita dan Yani, 2005:42)

2.4 Migrasi Internasional

Migrasi Internasional saat ini masuk dalam pembahasan yang penting dalam studi Hubungan Internasional.

Faktor-faktor yang menyebabkan Migrasi Internasional menurut buku *Issues in World Politic*, adalah :

1. Meningaktnya jumlah negara dalam system internasional sejak perang dunia 1 berakhir
2. Terjadinya pertumbuhan populasi yang sangat pesat sampai saat ini di seluruh negara-negara
3. Adanya revolusi di bidang komunikasi dan transportasi yang menyadarkan masyarakat akan keadaan dan kesempatan yang lebih baik di tempat lain, dan
4. Adanya kekacauan dan pergolakan dunia sehingga masyarakat mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain (White, 1997 : 200).

Tujuan dan motif utama melakukan migrasi menurut buku *Economic Development in The Third World*, adalah :

> "Untuk memperbaiki status dan keadaan ekonomi melalui pekerjaan dan pendidikan, yang diduga bisa diperoleh di kota atau negara lain. Banyak studi dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli menjelaskan bahwa sebagian besar orang melakukan migrasi karena keadaan ekonomi" (Todaro, 1997 : 174).

Dalam buku *Urbanization and Social Change in West Africa*, juga ditegaskan bahwa :

> "Keputusan untuk bermigrasi merupakan respon nasional terhadap kondisi ekonomi " (Gilbert & Gugler, 1978 : 185).

2.5 Pengertian Tenaga Kerja, Angkatan Kerja Dan Bukan Angkatan Kerja

Pengertian tenaga kerja adalah sebagai berikut :

> "Tenaga kerja adalah pendudukyang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain. Sedang bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang terakhir yaitu : pencari kerja, tidak bekerja dan mengurus rumah tangga. Walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan oleh batas umur" (Simanjuntak, 1995:15).

Pengertian angkatan kerja dan bukan angkatan kerja adalah sebagai berikut :

a. tenaga kerja (*Manpower*) adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
b. Angkatan kerja (*labour Force*) adalah bagian tenaga kerja yanfg sesungguhnya terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Konsep "*labour Force"* ini harus punya referensi waktu yang pasti, misalnya satu minggu atau sebelumnya.
c. Bukan angkatan kerja (*not in the labour force*) adalah bagian dari tenaga kerja (*Manpower*) yang tidak bekerja atau mencari kerja. Jadi mereka ini adalah sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha untuk tidak terlibat dalam kegiatan produktif (Kusumohwidjojo, 1997 : 32).

Sedangkan Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja menurut Biro Pusat Statistik adalah sebagai berikut :

Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun dan lebih) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan sementara, tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Mereka adalah penduduk dengan kegiatan :

a. Bekerja (paling sedikit satu jam dalam seminggu)
b. Punya pekerjaan sementara tidak bekerja
c. Mencari pekerjaan

Sedangkan yang dimaksud bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun atau lebih) yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan ataupun penduduk usia kerja dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Sekolah
b. Mengurus rumah tangga
c. Lainnya seperti pensiunan, cacat jasmani, dan sebagainya (http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/801/801/, diakses, 15 Mei 2010).